



BUPATI BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah dan kelestarian alam yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global melalui pengembangan pariwisata;
- c. bahwa dalam rangka mengendalikan masyarakat Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan usaha pariwisata di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wirta Tirta;

20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1173);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 07)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2017 (lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
dan  
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH  
BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang kepariwisataan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
18. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
19. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
20. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah.

22. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
23. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
24. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
25. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
26. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
27. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
28. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
29. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan Asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
30. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
31. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
32. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Hari Kerja adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah, penyelenggaraan Kepariwisata dimaksudkan untuk:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat kepariwisataan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat;
- d. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

### Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra Daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produk lokal, regional dan nasional; dan
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kepariwisata Daerah, meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Daerah;
- b. menetapkan destinasi pariwisata di Daerah;
- c. menetapkan daya tarik wisata di Daerah;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi pariwisata dan Produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Daerah;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

## BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
  - a. industri pariwisata;
  - b. destinasi pariwisata;
  - c. pemasaran; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam di Daerah.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### Bagian Kedua

#### Pembangunan Industri Pariwisata

#### Pasal 7

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan struktur industri pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Destinasi Pariwisata

#### Pasal 8

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. pembangunan daya tarik wisata;

- c. pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum; dan
  - d. pembangunan fasilitas pariwisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penganeekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
- (4) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (5) Pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Bagian Keempat Pembangunan Pemasaran

##### Pasal 9

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

#### Bagian Kelima Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

##### Pasal 10

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah;
- b. swasta dan masyarakat;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. regulasi peraturan perundang-undangan di Daerah; dan
- e. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

### BAB IV INDUSTRI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

##### Pasal 11

Industri Pariwisata terdiri dari :

- (1) Sumber daya Pariwisata
- (2) Fasilitas hiburan dan olahraga
- (3) Prasarana umum dan pariwisata
- (4) Pelayanan penerimaan pariwisata



(5) Fasilitas penerimaan

Pasal 12

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta;
  - m. *solus per aqua* (SPA); dan
  - n. jenis usaha pariwisata lainnya.
- (3) Jenis usaha pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Bidang usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
  - a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
  - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
  - b. pengelolaan goa;
  - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
  - d. pengelolaan museum;
  - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
  - f. pengelolaan objek ziarah; dan
  - g. jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (4) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Usaha Kawasan Pariwisata

#### Pasal 14

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
  - penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
  - usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

### Bagian Keempat Usaha Jasa Transportasi Wisata

#### Pasal 15

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ciri:
- mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
  - merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya.
- (3) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), meliputi jenis usaha:
- angkutan jalan wisata;
  - angkutan kereta api wisata; dan
  - angkutan sungai dan danau wisata.
- (4) Kegiatan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 16

- (1) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi jenis usaha:
  - a. biro perjalanan wisata; dan
  - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan wisata.
- (4) Kegiatan usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.
- (5) Kegiatan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 17

- (1) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rumah makan;
  - b. restoran;
  - c. bar di Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
  - d. kafe;
  - e. pusat penjualan makanan;
  - f. jasa boga; dan
  - g. jenis usaha jasa makanan dan minuman lainnya.
- (3) Kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis usaha jasa makanan dan minuman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf h, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

- (6) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (7) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (8) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (9) Pusat penjualan makanan dan minuman dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (10) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (11) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati.

## Bagian Ketujuh Penyediaan Akomodasi

### Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Bidang usaha penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
  - a. Hotel;
  - b. bumi perkemahan;
  - c. persinggahan karavan;
  - d. villa;
  - e. pondok wisata; dan
  - f. penyediaan akomodasi lainnya.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. hotel bintang; dan
  - b. hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

- (6) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (7) Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (8) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (9) Jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
  - (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, dapat diselenggarakan oleh perorangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

#### Pasal 20

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, meliputi jenis usaha:
  - a. gelanggang olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. hiburan malam;
  - e. panti pijat;
  - f. taman rekreasi;
  - g. karaoke;
  - h. jasa impresariat/promotor; dan
  - i. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya;
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. lapangan golf;
  - b. driving golf;
  - c. rumah bilyar;
  - d. gelanggang renang;
  - e. lapangan tenis;
  - f. pacuan kuda;
  - g. ice skating;

- h. pusat kebugaran (fitness center);
  - i. gelanggang futsal;
  - j. gelanggang bowling; dan
  - k. jenis usaha gelanggang olahraga lainnya.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sanggar seni;
  - b. galeri seni;
  - c. gedung bioskop;
  - d. gedung pertunjukan seni; dan
  - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. arena permainan anak dan keluarga; dan
  - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kelab malam;
  - b. diskotek; dan
  - c. pub.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. panti pijat;
  - b. refleksi; dan
  - c. mandi uap.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. taman rekreasi;
  - b. taman bertema; dan
  - c. jenis usaha taman rekreasi lainnya.
- (8) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.
- (9) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) selain huruf a, huruf b, dan huruf i, dapat dilaksanakan oleh usaha perseorangan atau badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan

### Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

#### Pasal 22

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

## Bagian Kesepuluh

### Usaha Jasa Informasi Pariwisata

#### Pasal 23

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

## Bagian Kesebelas

### Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

#### Pasal 24

- (1) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

## Bagian Keduabelas

### Usaha Jasa Pramuwisata

#### Pasal 25

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga belas

#### Usaha Wisata Tirta

##### Pasal 26

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf l, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempatbelas

#### *Solus Per Aqua (SPA)*

##### Pasal 27

- (1) Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf m, merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB V

### DESTINASI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan

##### Pasal 28

- (1) destinasi tujuan wisata terdiri dari :
- destinasi wisata alam ;
  - destinasi buatan ;
  - destinasi budaya ;
- (2) destinasi tujuan wisata ditetapkan dengan kriteria :
- adanya daya tarik;
  - aksesibilitas / sarana transportasi;
  - infrastruktur atau akses jalan yang baik;
  - pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi.



- (3) Perwilayahan Destinasi Tujuan Wisata meliputi:
- a. kecamatan batang;
  - b. kecamatan bandar;
  - c. kecamtan banyuputih;
  - d. kecamtan bawang;
  - e. Kecamtan Gringsing;
  - f. Kecamatan Subah;
  - g. Kecamatan Warungasem;
  - h. Kecamatan Tersono;
  - i. Kecamatan Limpung;
  - j. Kecamatan Reban.
- (4) hkhj

BAB VI  
PEMASARAN PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri

Pasal 29

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pemasaran (promosi) kepariwisataan Batang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga/instansi lainnya.
- (2) Disamping bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga/Instansi lain, Pemerintah Kabupaten juga melakukan Pemasaran Kepariwisataaan Batang dengan cara langsung dan tidak langsung:
- (3) Pemasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: mengikuti *event-event* di dalam dan luar negeri, *Road show, sales mission*.
- (4) Pemasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: melalui media cetak, elektronik, dan penyebaran brosur.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerjasama untuk melakukan promosi kepariwisataan Batang.

BAB VII  
KELEMBAGAAN PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan antara lain meliputi, pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan Pariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak**

**Pasal 32**

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 33**

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

**Pasal 34**

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

**Pasal 35**

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

**Pasal 36**

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan

- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
  - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
  - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 38

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

### Pasal 39

Setiap wisatawan berkewajiban

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

### Pasal 44

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah dan Negara melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan sistem kepariwisataan;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 54

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan usaha pariwisata diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Sanksi Administratif

#### Pasal 55

(1) Jenis sanksi administratif meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan

(2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja

(3) Sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 58

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN

### PIDANA

#### Pasal 59

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

#### Pasal 60

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penataan ruang, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 61

Izin pengusahaan pariwisata yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal            2017  
BUPATI BATANG,

ttd.

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal            2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

ttd.

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR ..... SERI .....